

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya. Sesuai dengan kewenangannya, setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan atas kebutuhan dasarnya.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya tersebut adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah, yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah tujuan dari pendirian BUMD adalah memberikan sumbangsih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengejar dan mencari keuntungan, pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha, dan memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

Keberadaan BUMD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat, khususnya di daerah. Pendirian BUMD diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), merupakan salah satu BUMD yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum. Bagi Pemerintah Daerah sendiri, pendirian PDAM mempunyai tujuan untuk menyediakan jasa pelayanan kebutuhan air bersih kepada warga masyarakat dan turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Apabila merujuk pada aturan pendirian dan tujuannya, PDAM diharapkan mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan *corporate value* dan kepercayaan pemegang saham. Oleh karena itu PDAM harus bisa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Penerapan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan untuk menjamin agar tujuan perusahaan tercapai dengan se-efisien mungkin.

Salah satu upaya agar dapat terus berkembang, perusahaan perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi, daya saing dan pengembangan usaha. Salah satu upaya adalah dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja yang dapat menghasilkan *feed back* bagi pencapaian tujuan yang lebih efektif dan efisien.

Penilaian terhadap aspek keuangan masih sangat perlu untuk dilakukan karena penilaian kinerja dilihat dari aspek keuangan perusahaan dapat memberikan gambaran apakah strategi, sasaran strategi, inisiatif strategi, dan implementasi, mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan laba/ rugi bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat bertahan hidup, berhasil,

dan sejahtera. Hasil pengukuran kinerja ini dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dan juga sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan.

Sebagai salah satu perusahaan yang di tuntut untuk bisa mengejar dan mencari keuntungan, maka PDAM dituntut untuk dapat menjalankan strategi yang tepat, sehingga memiliki keunggulan dalam bersaing. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam menghadapi persaingan adalah menghasilkan pendapatan dari aktivitas penjualan.

Bagi PDAM pengakuan pendapatan di lakukan secara *accrual Basis*. Teknik basis akrual memiliki pencatatan dimana transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar – benar diterima atau dikeluarkan. Dalam prakteknya yang dimaksudkan dengan pendapatan oleh PDAM adalah jumlah rekening terbit (jumlah air yang sudah di konsumsi oleh pelanggan). Atau dengan kata lain PDAM adalah perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit.

Kesuksesan perusahaan dalam bisnis hanya bisa dicapai melalui pengelolaan yang baik, khususnya pengelolaan manajemen keuangan, salah satu nya adalah dalam mengelola piutang perusahaan. Besar kecilnya piutang yang dimiliki oleh perusahaan akan mempengaruhi kondisi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Piutang usaha suatu perusahaan pada umumnya merupakan bagian terbesar dari aktiva lancar serta bagian terbesar dari total aktiva perusahaan. Piutang meliputi semua tagihan dalam bentuk utang kepada perorangan, badan usaha atau pihak lainnya. Piutang adalah pos penting dalam perusahaan karena merupakan aktiva lancar yang *likuid* dan selalu dalam keadaan berputar.

PDAM Kota Kupang merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Kota Kupang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2005 tanggal tanggal 19 September 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang. Manajemen PDAM Kota Kupang mulai resmi beroperasi pada tanggal 3 April 2009. Aset PDAM Kota

Kupang seluruhnya berasal dari aset UPTD Air Bersih Kota Kupang yang terbentuk pada tahun 2003.

Kelompok pelanggan PDAM Kota Kupang dibagi dalam sebelas (11) kelompok dan tarif yang berbeda sesuai dengan Keputusan Walikota Kupang Nomor 132/KEP/HK/2013 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang, yaitu : Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Prima, Niaga Kecil, Rumah Tangga A, Rumah Tangga B, Rumah Tangga A Prima, Rumah Tangga B Prima, Sosial Khusus, Sosial Khusus Prima, Sosial Umum dan Kesepakatan

Dalam perkembangannya PDAM Kota Kupang memiliki masalah dalam penyelesaian piutang usahanya.

Tabel 1.1.
Laporan Efektivitas Penagihan
PDAM Kota Kupang
Tahun 2016

No.	Bulan	Rekening Terbit	Rekening Terbayar	Piutang	Efektifitas Penagihan Bulan Berjalan
1	Januari	688.174.000	360.027.000	328.147.000	52,32%
2	Febuari	671.087.950	351.979.700	319.108.250	52,45%
3	Maret	678.616.300	377.298.900	301.317.400	55,60%
4	April	743.426.750	393.126.000	350.300.750	52,88%
5	Mei	784.095.300	407.252.000	376.843.300	51,94%
6	Juni	781.380.150	354.016.000	427.364.150	45,31%
7	Juli	764.859.050	419.833.400	345.025.650	54,89%
8	Agustus	768.163.400	421.660.000	346.503.400	54,89%
9	September	829.025.750	447.293.950	381.731.800	53,95%
10	Oktober	853.609.450	438.920.150	414.689.300	51,42%
11	November	757.942.300	392.861.850	365.080.450	51,83%
12	Desember	696.847.700	368.166.500	328.681.200	52,83%
		9.017.228.100	4.732.435.450	4.284.792.650	52,53%

Sumber : Laporan Rekening PDAM Kota Kupang

Tabel 1.2.
Laporan Efektivitas Penagihan
PDAM Kota Kupang
Tahun 2017

No.	Bulan	Rekening Terbit	Rekening Terbayar	Piutang	Efektifitas Penagihan Bulan Berjalan
1	Januari	789.587.700	353.642.350	435.945.350	44,79%
2	Febuari	783.599.550	375.259.200	408.340.350	47,89%
3	Maret	762.413.200	349.821.950	412.591.250	45,88%
4	April	829.397.100	387.264.200	442.132.900	46,69%
5	Mei	886.197.450	361.545.600	524.651.850	40,80%
6	Juni	795.558.900	396.470.250	399.088.650	49,84%
7	Juli	789.929.800	382.264.900	407.664.900	48,39%
8	Agustus	938.189.250	457.405.300	480.783.950	48,75%
9	September	937.752.750	447.812.500	489.940.250	47,75%
10	Oktober	952.852.750	471.924.000	480.928.750	49,53%
11	November	829.267.750	379.962.250	449.305.500	45,82%
12	Desember	890.880.700	445.609.400	445.271.300	50,02%
		10.185.626.900	4.808.981.900	5.376.645.000	47,18%

Sumber : Laporan Rekening PDAM Kota Kupang

Tabel 1.3.

Laporan Efektivitas Penagihan
PDAM Kota Kupang
Tahun 2018

No.	Bulan	Rekening Terbit	Rekening Terbayar	Piutang	Efektifitas Penagihan Bulan Berjalan
1	Januari	930.959.000	441.081.200	489.877.800	47,38%
2	Februari	826.626.500	383.386.000	443.240.500	46,38%
3	Maret	795.684.700	389.358.800	406.325.900	48,93%
4	April	874.395.050	439.005.850	435.389.200	50,21%
5	Mei	882.614.350	410.854.850	471.759.500	46,55%
6	Juni	976.308.250	512.368.750	463.939.500	52,48%
7	Juli	895.516.650	430.366.750	465.149.900	48,06%
8	Agustus	864.119.400	418.383.400	445.736.000	48,42%
9	September	944.039.400	448.798.750	495.240.650	47,54%
10	Oktober	885.893.500	423.076.300	462.817.200	47,76%
11	November	934.853.400	403.726.800	531.126.600	43,19%
12	Desember	817.586.050	396.230.650	421.355.400	48,46%
		10.628.596.250	5.096.638.100	5.531.958.150	47,95%

Berdasarkan ke tiga tabel di atas dapat dilihat bahwa laporan efektivitas penagihan bulanan, rata- rata piutang tertagihnya masih dianggap kecil yaitu tahun 2016 sebesar 52,53%, tahun 2017 sebesar 47,18%, dan tahun 2018 sebesar 47,95%.

Menurut ketentuan SAK ETAP piutang adalah hak tagih PDAM yang timbul dari transaksi penjualan air, penjualan non air dan penjualan lainnya yang akan diterima pembayarannya pada masa yang akan datang. Piutang terbagi atas:

1. Piutang Usaha yaitu piutang yang timbul dari transaksi penjualan air dan non air,

Piutang Usaha diakui dengan terbitnya Daftar Rekening Ditagih (DRD) Air dan Daftar Piutang/Tagihan Non Air.

2. Piutang Non Usaha yaitu piutang yang timbul dari transaksi lainnya selain transaksi penjualan air dan non air.

Piutang non usaha diakui apabila ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa yang akan datang mengalir ke PDAM dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.

Rekening terbit bagi PDAM diakui dengan contoh pemakaian air oleh pelanggan pada bulan Januari akan muncul sebagai rekening terbit bulan Januari dengan waktu pembayaran di bulan Februari. Piutang muncul sebagai akibat tidak dibayarnya rekening Januari sampai akhir bulan Februari. Berdasarkan penilaian kinerja PDAM dikatakan berkinerja baik bila efektivitas penagihannya 90%. Menurut metode *cash conversion cycle*, piutang yang tidak diikuti dengan kegiatan penagihan yang baik akan menghambat *cash flow* perusahaan untuk membeli persediaan dan mempertahankan kegiatan operasional yang berakibat pada likuiditas. Jika peningkatan piutang tidak diikuti dengan usaha penagihan maka akan memperbesar jumlah piutang ragu-ragu pada perusahaan dan semakin besarnya piutang ragu-ragu maka likuiditas yang dimiliki perusahaan cenderung semakin kecil.

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah tahun 2000. Piutang harus disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasi. Khusus untuk piutang usaha ketentuan ini menghendaki agar piutang-piutang yang mempunyai kemungkinan tak tertagih hendaknya dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang layak.

PDAM Kota Kupang telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meminimalisir jumlah piutang pelanggan yang tidak tertagih. Langkah atau tindakan yang dilakukan oleh PDAM adalah:

1. Adanya tim penagihan yang akan menagih kepada pelanggan yang menunggak lebih dari 3 bulan.
2. Adanya kebijakan pembayaran tunggakan dengan sistem cicil bagi pelanggan yang tidak bisa melunasi tunggakannya yaitu minimal 60% dari nilai tunggakannya.

Pengendalian terhadap piutang dianggap penting, bukan hanya karena akan memengaruhi arus kas perusahaan, namun juga akan berpengaruh pada laporan laba rugi perusahaan dan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Dalam laporan laba rugi PDAM, pada tiap akhir tahunnya akan di hitung besarnya beban penyisihan piutang. Penghitungan beban penyisihan piutang menurut SAK ETAP adalah dihitung dengan cara merata-ratakan piutang tak tertagih yang dimiliki oleh PDAM selama tiga (3) tahun berturut-turut kemudian dikalikan dengan jumlah piutang yang ada.

Dalam laporan kinerja keuangan perusahaan, piutang menjadi penting karena menjadi salah satu indikator untuk dinilai yaitu jangka waktu penagihan piutang dan efektivitas penagihan.

Penelitian terkait dengan efektivitas manajemen piutang dilakukan oleh Ria Agustina tahun 2009 dengan judul penelitian Analisis Efektivitas Manajemen Piutang (studi kasus PT.Unitex Tbk Bogor) yang menyimpulkan bahwa rasio keuangan, rasio likuiditas yang dihasilkan tidak likuid walaupun rasio penagihan piutang kepada pelanggan sudah baik. Menurut penelitian rasio likuiditas dinyatakan tidak likuid karena perusahaan belum mampu memenuhi kewajiban lancar, sedangkan rasio penagihan dinyatakan baik karena jumlah piutang dari para pelanggan semakin rendah, hal ini dibuktikan dengan pelanggan dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Rasio keuangan PT.Unitex Tbk teragnggu karena banyak nya pelanggan yang melakukan klaim kerusakan atas produk yang mereka jual.

Menurut Yasni dalam penelitiannya dengan judul Analisis Pengendalian Piutang Dan Rata-Rata Piutang Terhadap Perputaran Piutang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makasar tahun 2016, menyimpulkan bahwa rasio perputaran piutang pada PDAM Kota Makasar sangat buruk yang menyebabkan jumlah tunggakan piutang tak terbayar semakin besar pada

setiap tahunnya . Hal ini akan berakibat buruk bagi perusahaan karena semakin kecil piutang perusahaan yang berubah menjadi kas, dan rasio likuiditas perusahaan semakin buruk.

Mengingat masih ada inkonsistensi terhadap hasil-hasil penelitian (*research gap*) yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi lagi inkonsistensi hasil-hasil penelitian tersebut dengan menganalisis efektifitas manajemen piutang yang ada di PDAM Kota Kupang. Sebagai perusahaan yang menetapkan penjualan kredit secara keseluruhan sehingga akan memunculkan sebuah piutang usaha, dimana piutang usaha pada PDAM Kota Kupang merupakan komponen penting kedua dalam aktiva lancar sehingga PDAM Kota Kupang membutuhkan sebuah manajemen piutang. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Manajemen Piutang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian adalah bagaimana efektivitas pengelolaan manajemen piutang PDAM Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan manajemen piutang PDAM Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak yang memerlukannya diantaranya adalah:

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam penetapan kebijaksanaan, pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, dan strategi

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan manajemen atau pengelolaan piutang.

2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan topik yang sama.

